

**PENANAMAN SIKAP DEMOKRATIS MELALUI KEGIATAN  
KEPRAMUKAAN BAGI SISWA SLTP NEGERI 3 WERU  
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

**NASKAH PUBLIKASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai  
derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan  
Pancasila dan Kewarganegaraan



**Ardhitya pratama**

**A220080058**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102

**Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Suyahman, M.Si., MH

NIK : 442

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : ardhitya pratama

NIM : A220080058

Fakultas/Jurusan : FKIP/PPKn

Jenis : **PENANAMAN SIKAP DEMOKRATIS MELALUI KEGIATAN**

**KEPRAMUKAAN BAGI SISWA SLTP NEGERI 3 WERU**

**KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO**

**TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dapat dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 21 Oktober 2013

Pembimbing,

Drs. Suyahman, M.Si., MH  
NIK: 442

**PENANAMAN SIKAP DEMOKRATIS MELALUI KEGIATAN  
KEPRAMUKAAN BAGI SISWA SLTP NEGERI 3 WERU  
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014  
(Studi kasus pada kegiatan kepramukaan)**

Iqni Malfaid, A220090046, Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2013, xvii+70 halaman

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik fanatisme suporter sepak bola yang dapat menanamkan solidaritas sosial, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berkaitan dengan fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial, untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial, untuk mendeskripsikan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala apakah yang dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura. Metode yang digunakan adalah studi kasus, karena hanya fokus pada kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik fanatisme suporter sepak bola yang dapat menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura dapat dibuktikan dengan cara mengadakan bakti sosial (baksos), penggalangan dana bantuan yang terkena bencana alam, serta mengikuti kegiatan-kegiatan positif. 2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura dapat dilihat dari faktor kebersamaan antar anggota Pasoepati yang mana terkandung nilai-nilai solidaritas sosial yang meliputi kasih sayang, tanggung jawab dan keserasian hidup. 3) Kendala-kendala yang dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura dapat dilihat adanya rasisme dan anarkisme antar suporter yang mengakibatkan putusanya hubungan silaturahmi dengan suporter lain dan banyaknya orang yang terprovokasi yang bertujuan untuk merusak hubungan kekeluargaan antar suporter lain. 4) Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala apakah yang dihadapi para fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Korwil Kartasura dengan cara mengadakan rapat antar korwil-korwil Pasoepati di seluruh kota Solo, kemudian dari organisasi tertinggi DPP Pasoepati memberikan masukan kepada korwil-korwil Pasoepati di kota Solo untuk saling menjaga tali silaturahmi antar korwil Pasoepati.*

*Kata Kunci: Fanatisme, Suporter sepak bola, Solidaritas sosial.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal bakal yang akan meneruskan dan melaksanakan cita-cita luhur bangsa dan Negara, sebagai calon pelaksana pembangunan, dan sebagaian calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. sehingga perlu ditanamkan konsep-konsep bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penanaman sikap demokratis pada anak. Hal ini dikarenakan Negara RI menganut asas demokratis Pancasila, yang memengang prinsip dekokratis dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan.

Kaelan (2003:82-83) menjelaskan bahwa demokratis yang terkandung dalam pancasila sebagi dasar Negara Indonesia memiliki nilai-nilai sebagai berikut :

1. Adanya kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
3. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
4. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, suku, agama, kerena perbedaan merupakan bawaan kodratyah manusia.
5. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kolompok. Ras, suku, maupun agama.
6. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradap. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradap.
7. Mewujutkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa domokratis terkait erat dengan pola dalam kehidupan social bermasyarakat maupun berkelompok. Dalam konsep demokratis yang telah diutarakan tersebut, menunjukkan perlunya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan suatu keputusan guna menghormati perbedaan individu antar manusia sebagai kompenen masyarakat. Konsep demokrasi menekankan adanya kerjasama yang saling menghormati dan menjunjung tinggi keadilan.

Di sekolah, anak dibimbing untuk memahami pengertian, arti penting dan manfaat demokrasi untuk berbagai keperluan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat dan Negara. Disamping penanaman konsep dan sikap demokratis melalui materi pelajaran siswa juga dilibatkan dalam kegiatan – kegiatan praktis yang diharapkan dapat mendukung penanaman sikap demokratis, seperti melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kepramukaan,

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Kajian Teori Tentang Pendidikan**

Ilmu pendidikan atau disebut sebagai paedagogic dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenungkan tentang konsep – konsep dalam mendidik. Istilah paedagogic berasal dari pedagogia yang berarti pergaulan anak – anak (Purwanto 1998). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa ilmu pendidikan selalu memerlukan inovasi – inovasi konsep yang mengarah pada peningkatan kualitas anak didik

Menurut Barnadib (1984) dalam ilmu pendidikan dibedakan menjadi empat, yaitu ilmu pendidikan teoritis, ilmu pendidikan praktis, ilmu pendidikan sistematis, dan ilmu pendidikan historis. Ilmu pendidikan teoritis memberikan renungan teoritis yang tersusun, teratur, logis dan tentang masalah dan ketentuan pendidikan. Ilmu ini memiliki titik tolak pada praktek pendidikan menuju pemikiran sistematis dan mengenal juga persoalan-persoalan yang bersifat filosofis yang berhubungan dengan pendidikan. Ilmu pendidikan praktis memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan pada perbuatan mendidik. Ilmu ini menempatkan diri dari dalam situasi pendidikan dan mengarah pada perwujudan atau realisasi ide-ide pendidikan.

Apabila dikaitkan dengan peningkatan kualitas dalam pendidikan. Maka terdapat kaitannya yang jelas antara ilmu pendidikan teoritis, praktis, historis, dan sistematis. Untuk memaksimalkan kualitas anak didik diperlukan suatu teknik atau metode yang paling sesuai dengan kondisi siswa. Untuk

menemukan metode ini, diperlukan suatu konsep sistematis yang dapat digali dari pengalaman atau histori pada masa lampau.

## **2. Kajian Teori Tentang Kepramukaan**

Pemerintahan Negara Republik Indonesia menyadari bahwa anak – anak dan pemuda perlu dididik untuk menjadi warga Negara yang memiliki kepribadian dan berwatak luhur, yang cerdas, cakap, tangkas, terampil dan rajin, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani, ber – Pancasila, serta setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka. Dalam Kepres tersebut, dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengharapkan terbentuknya generasi yang mampu bertindak dan berfikir atas landasan manusia sosialis Indonesia (bukan seperti manusia sosialis di Negara – Negara berpahamkan sosialis seperti RRC) sehingga para generasi bangsa mampu menjadi kader pembangunan yang cakap dan bersemangat tinggi bagi Amanat Pendirian Rakyat (AMPERA). Dengan demikian, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mengupayakan pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut disamping pendidikan formal di sekolah, dan harus diupayakan dengan jalan kepanduan disesuaikan dengan pertumbuhan bangsa dan masyarakat Negara saat ini. Gerakan pramuka, sebagai kelanjutan dan pembahasan gerakan kepanduan nasional, dibentuk oleh karena dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka mengupayakan pendidikan bagi kaum muda melalui kegiatan kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, ideology Pancasila, Kerukunan dan Perdamaian, serta lingkungan hidup. Upaya pendidikan yang dilakukan melalui Gerakan Pramuka dilandasi oleh system “Among” dengan prinsip dasar dan system kepramukaan.

Gerakan Pramuka memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berdasarkan system Among dengan

menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan motto Gerakan Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan Bangsa serta Masyarakat Indonesia. Metode Kepramukaan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, serta system berkelompok. Kode kehormatan pramuka terdiri dari atas janji yang disebut Satya, dan ketentuan moral yang disebut Darma. Kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan suka rela ditaati demi kehormatan dirinya.

### **3. Kajian Teori Tentang Demokrasi**

Demokrasi berasal dari kata demos Yang artinya rakyat dan kratos Yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan Yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Menurut perkembangan sekarang, demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan/politik saja, tetapi juga pada bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif ) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislative dibuat oleh masyarakat

atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses Pemilu legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil - hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga Yang berhak dan secara Sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat Yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti Yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem Yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga Yang telah rnelewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan Yang tak memiliki catatan Kriminal ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Unsur-unsur yang terdapat dalam demokrasi diantaranya yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan menghargai. Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut Kaelan (2003: 82-83):

a. Kebebasan

Demokrasi memberikan kebebasan dalam hal menpergunakan ide atau pendapat dan melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku

b. Tanggungjawab

Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



c. Menghargai

Didalam demokrasi mengakui persamaan hak yang melekat pada setiap individu dan menghargai pendapat setiap individu (Sutari Imam Burnadi, 1975 : 9).

## METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah di SLTP Negeri 3 Weru Kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. Adapun tahapan-tahapan maupun perincian kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perincian Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan		x	x	x								
	a.Penyusunan proposal			x	x	x							
	b.Mengurus Perijinan						x						
	c. Menyusun Instrumen						x						
2.	Tahap pelaksanaan							x					
	Pengumpulan data							x					
	Analisis data								x				
	Perumusan hasil penelitian								x				
3.	Tahap penyelesaian									x	x		
	a.Penyelesaian kerangka laporan									x			
	b.Penulisan Laporan									x	x		
	c.Revisi dan Editing Laporan										x	x	
	d.Penyerahan Laporan												x

## **HASIL PENELITIAN**

### **Profil SLTP Negeri 3 Weru**

SLTP Negeri 3 Weru terletak di desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Sekolah ini didirikan pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 1997. Dibangun diatas tanah pemerintah dengan luas 6.000 m<sup>2</sup>. Kondisi sekolah secara umum adalah baik, kondisi kesehatan lingkungan cukup standar berdasarkan baku mutu kesehatan lingkungan. Lingkungan sekolah cukup bersih dan memiliki tempat pembuangan sampah yang secara rutin dibersihkan oleh petugas. Kesehatan lingkungan selalu dikontrol oleh guru dan kepala sekolah agar benar-benar dapat menunjang suasana belajar yang sehat. Sanitasi gedung sekolah sesuai dengan persyaratan kesehatan, yaitu adanya ventilasi yang mendukung sirkulasi udara yang cukup dalam ruangan kelas, terdapat pencahayaan yang cukup dan tidak lembab, kondisi ruangan kering dan tidak berdebu.

Sekolah memiliki gedung dengan kondisi cukup baik untuk menampung seluruh jumlah siswa. Gedung sekolah masih cukup luas untuk menampung seluruh siswa yang ada. Setiap ruang kelas memiliki ukuran yang cukup longgar, dan terbuat dari tembok yang mampu menghalangi suara dari ruang kelas lainnya. Jumlah ruang kelas yang ada pada sekolah ini sebanyak 13 ruang. Kondisi ini mendukung untuk siswa berkonsentrasi pada materi pembelajaran.

Sekolah sudah memiliki ruang perpustakaan khusus dan telah dikelola dengan baik sehingga siswa sudah dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah. Perpustakaan di SLTP Negeri 3 Weru ini dilengkapi dengan 1 ruang baca, 1 ruang penyimpanan, 1 ruang pelayanan/ petugas/ 3 buah rak buku, 2 buah rak buku berpintu, 10 buah meja baca, 20 buah kursi, 1 buah meja pelayanan, 1 buah meja kerja, 1 buah kursi kerja dan sebuah komputer.

### **Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sikap demokratis pada dasarnya adalah sikap yang merupakan pengamalan dari sila 4 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.

Sila tersebut memiliki dua implikasi yang mendasar, yaitu implikasi politis dan implikasi sosial. Implikasi politis dari sila tersebut adalah kepemimpinan yang demokratis, yaitu kepemimpinan dari rakyat- oleh rakyat-dan untuk rakyat. Pengertian ini disesuaikan dengan konsep tentang demokrasi Pancasila, dengan merujuk pada kata “*dipimpin*” dan kata “*perwakilan*”. Pengertian ini adalah adanya unsur pemilihan kepemimpinan secara bebas oleh rakyat dan adanya wakil rakyat. Sementara itu, implikasi secara sosial mendasarkannya pada kalimat “*oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan*”. Pengertian tersebut adalah mendasarkan segala keputusan bersama melalui musyawarah. Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam musyawarah adalah menghormati hak orang lain berpendapat (pasal 28 UUD 45), menghormati hak orang lain dalam bersikap, dan menghormati segala aspek kebebasan orang lain. Pengertian kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu dibatasi oleh aturan-aturan guna menjaga kepentingan orang lain.

Konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berperan dalam menanamkan sikap demokratis, sebagai mana yang dilaksanakan di SLTP Negeri 3 Weru. Adapun kegiatan-kegiatan kepramukaan yang mampu menanamkan sikap demokratis adalah:

Kegiatan pemilihan ketua regu dan perindukan Pemilihan ketua dilakukan secara bebas oleh anggota melalui mekanisme pencalonan dengan syarat kecakapan dan keberanian. Persyaratan tersebut pada dasarnya bukanlah bentuk pengekan terhadap kebebasan mencalonkan diri, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan agar nantinya tidak menyulitkan diri sendiri dan anggota kelompok. Melalui percontohan dalam kegiatan pemilihan ketua regu dan perindukan tersebut, maka siswa dibimbing untuk belajar berpolitik, yaitu dengan menggunakan hak untuk memilih dan dipilih. Siswa dilatih untuk tidak memaksakan kehendak serta menghormati kebebasan rekannya untuk memberikan suara atau hak pilihnya. Dengan demikian, maka siswa secara tidak langsung dibimbing untuk melaksanakan ketentuan demokrasi baik dalam aspek politis maupun sosial secara benar. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Exsan Wibowo :

“Kegiatan pemilihan ketua regu dilaksanakan dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan pemilihan ketua secara rinci agar siswa mengerti pelaksanaan pemilihan pimpinan yang demokratis”.

(wawancara 27 September 2013)

Kegiatan pemilihan ketua regu dilaksanakan dengan menjelaskan maksud dari setiap langkah yang harus dilaksanakan siswa. Siswa belajar bagaimana mekanisme yang tepat dan demokratis dalam melaksanakan pemilihan pimpinan. Pelatihan praktis ini cukup membawa dampak baik bagi pengetahuan demokrasi pada siswa, sesuai dengan penjelasan dari Luluk Rahmawati:

“Saya jadi tahu pemilihan ketua yang demokratis. Kalau saat dijelaskan didalam kelas, saya malah tidak Tahu”

((wawancara 27 September 2013)

## **KESIMPULAN**

Nilai demokratis merupakan implementasi dari sila ke IV Pancasila yang metigandung makna politis dan sosial. Dalam kegiatan kepramukaan yang dilakukan di SLTP Negeri 3 Weru, terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki peran dalam menanamkan sikap demokratis siswa.

1. Dalam kegiatan-kegiatan beregu seperti kegiatan memecahkan masalah secara bersama-sama dengan permainan kayu yang dirangkaikan menjadi bentuk ikan, permainan pertanyaan, lomba asah ingatan, dan lomba analisis cerita heroik. Dalam kegiatan tersebut siswa saling bertanya, dan menjawab, saling mengemukakan pendapat, dan siswa dilatih untuk tertib memberikan giliran pada siswa lainnya untuk mengemukakan pendapat
2. Kendala yang sering ditemui dalam pengembangan sikap demokratis melalui kegiatan pramuka adalah sifat individual dan egois yang ada pada diri siswa, serta banyak siswa yang merasa malu dan enggan untuk mengekspresikan dirinya.
3. Dengan pengembangan beberapa kegiatan kepramukaan, maka kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Misalnya dalam kegiatan pemilihan ketua, siswa

dituntut untuk tidak memaksakan kehendaknya sendiri, siswa diarahkan untuk melakukan musyawarah dalam pemilihan tersebut, sehingga pemilihan tersebut benar-benar berjalan dengan demokratis. Dengan kegiatan api unggun, siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dengan rekannya dan meningkatkan rasa percaya diri mereka serta mampu mengekspresikan diri mereka. Sehingga sikap demokratis dapat tertanam pada diri siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi. 1991. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.  
*Buku Saku Pramuka*, Solo: Sendang Ilmu.

Muloeng, 1995, *Metode Kualitatif Penelitian*, Jakarta: Sandra Offsett.

Nia Evoliny., 2007. *Kepemimpinan Demokratis di dalam Kelas*.  
[www.Ainikubisaxom](http://www.Ainikubisaxom)

Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sutopo, 1413, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press

Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi research IV*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.

*Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) Golongan Penegak*, Ari Collection.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Internet available from [http://www.geocities.com/frans\\_98/uu/uu\\_20\\_03.htm](http://www.geocities.com/frans_98/uu/uu_20_03.htm). Accessed on Juli 10th 2013

Widodo, Agus HS, 2010. *Materi Pokok Kursus Mahir Dasar*. Klaten : Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Cabang Klaten.